

Nomor : B- 243/BLSDM/LT.03.07/11/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembukaan Program Magister Ilmu Hukum
Kekhususan Regulasi Digital
Universitas Padjajaran

Jakarta, 29 November 2022

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di Tempat

Dalam rangka peningkatan profesionalisme serta kapasitas sumber daya manusia khususnya praktisi, peneliti dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung penerapan, penegakan hukum, pembuatan kebijakan serta pemeriksaan di bidang kebijakan dan hukum digital, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran membuka kesempatan bagi Pegawai di lingkungan Kementerian/ Lembaga untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana melalui Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Program Magister Ilmu Hukum yang dirancang khusus berbasis proyek untuk bidang Regulasi Digital.

Sasaran Program Magister Ilmu Hukum ini adalah untuk menghasilkan profesional yang memiliki kompetensi hukum dan moralitas yang tinggi serta berperan dalam pembangunan dan pembaruan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat baik nasional, regional, maupun internasional. Program studi ini akan ditempuh selama 3 semester dengan metode pembelajaran *Interactive Teaching*, *Student Center Learning*, *Research Based Learning*, dan *Project Based Learning*. Dosen pengajar dan dosen *prominent/praktisi* mengajar secara daring serta dosen tutor (untuk mata kuliah tertentu) mengajar secara *hybrid* dalam membantu pengerjaan *project* mata kuliah.

Program Magister Ilmu Hukum merupakan program pascasarjana multi entry yang terbuka bagi lulusan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Pada program ini mahasiswa akan diajarkan isu-isu terkini pada bidang hukum baik dari sisi akademis maupun praktis. Pendaftaran Beasiswa Program Magister Ilmu Hukum Kekhususan Regulasi Digital dilakukan secara paralel antara pendaftaran melalui Balitbang SDM dengan melengkapi berkas persyaratan yang dikirimkan kepada Tim Admin Beasiswa Sekretariat Badan Litbang SDM melalui surel beasiswadn@kominfo.go.id dengan format subject: **PENDAFTARAN_FH_UNPAD_NAMA** dan pendaftaran secara daring melalui laman <https://smup.unpad.ac.id/magister/> paling lambat tanggal 11 Desember 2022. Keterangan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Program Beasiswa ini dapat menghubungi tim admin beasiswa melalui Layanan Helpdesk: 0857-6000-8994 dan informasi mengenai prosedur pendaftaran dapat dilihat pada situs web resmi Universitas Padjadjaran di <https://smup.unpad.ac.id/magister/>.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk menyebarluaskan informasi ini kepada Pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga Bapak/Ibu. Terlampir kami sampaikan pula persyaratan umum, prosedur pendaftaran dan daftar berkas seleksi administrasi yang perlu dilengkapi atau melalui scan QR Code di bawah ini.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

HARY BUDIARTO

Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika; dan
2. Kepala Biro Kepegawaian



**Syarat Pendaftaran Program Magister Ilmu Hukum yang Dirancang Khusus
Berbasis Proyek untuk Bidang Regulasi Digital
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Dokumen dan/atau data yang diperlukan untuk mendaftar Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) adalah sebagai berikut:

1. Lulusan program sarjana yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes.
2. Memiliki **sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA)** dari **Pusat Inovasi Psikologi Universitas Padjadjaran (PIP Unpad)** dengan nilai **minimal 450** yang masih berlaku, atau Tes Potensi Akademik (TPA) institusi penyelenggara resmi lainnya yang diakui UNPAD yaitu:
 - o PLTI Himpsi; UGM; UNAIR; UI; BAPPENAS
3. Memiliki **sertifikat English Language Test (ELT) UNPAD** yang masih berlaku dengan nilai **minimal 450**, atau tes kemampuan Bahasa Inggris dari institusi penyelenggara resmi yang diakui UNPAD yaitu:
 - o International TOEFL (Paper-Based Test) nilai minimal 450;
 - o International TOEFL (Internet-Based Test) nilai minimal 45;
 - o International TOEFL (Computer-Based Test) nilai minimal 135;
 - o Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) nilai minimal 450;
 - o International English Language Testing System (IELTS) Academic dari institusi British Council, IALF, dan IDP nilai minimal 4,5.
 - o English proficiency dari Duolingo (<https://englishtest.duolingo.com/>) nilai minimal 75.
 - o Lembaga Bahasa dari ITB atau UPI.
 - o Lembaga The British Institute (TBI) atau Education First (EF)
 - o Catatan:
 - Pendaftar yang menggunakan **sertifikat Bahasa Inggris di luar lembaga resmi yang tertulis di atas**, akan membutuhkan waktu lama (> 1 bulan) untuk proses verifikasi ke lembaga resmi penyelenggara, sehingga kemungkinan bagi pendaftar yang memenuhi syarat **tidak akan terpanggil wawancara sesuai sesi seleksi/ gelombang dimana peserta mendaftar.**
 - Bagi pendaftar yang tidak memenuhi syarat untuk wawancara dalam satu sesi seleksi, akan diikutkan ke sesi seleksi berikutnya jika telah memperbaiki/ melengkapi dokumen yang kurang **tanpa harus membayar biaya pendaftaran kembali kalau masih dalam gelombang yang sama.**

4. Bagi peserta yang mempunyai **publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi (Q1)** menurut [SJR: Scientific Journal Rankings – SCImago](#) sebagai penulis pertama, tidak diwajibkan memiliki dan mengupload nilai TPA dan TKBI ketika mendaftar.
5. Semua berkas di lampirkan atau di upload di laman SMUP ketika melakukan pendaftaran.
 - o Bagi yang berminat mengikuti TKA Online yang diselenggarakan oleh **PIP Unpad**, silahkan akses <http://pip.unpad.ac.id/announcement/Tes-Kemampuan-Akademik-TKA>.
 - o Bagi yang berminat ingin mengikuti TKBI Online yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Unpad, silahkan akses laman <https://pendaftaran.unpad.ac.id/>.

Persyaratan Dokumen kelengkapan dan Timeline Pendaftaran Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo

I. Persyaratan Pendaftar

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Masa kerja minimum 2 tahun (terhitung sejak menjadi CPNS);
- c. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;
- d. Berusia maksimum 37 tahun pada saat mendaftarkan diri;
- e. Mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) di satuan kerja yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;
- f. Persyaratan standar IPK minimal 3,00; dan
- g. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa Magister Ilmu Hukum yang dirancang khusus berbasis proyek untuk bidang Kekhususan Regulasi Digital adalah tugas dan fungsinya terkait penerapan, penegakan hukum, pembuatan kebijakan serta pemeriksaan/ audit di bidang kebijakan dan hukum digital.

II. Dokumen Persyaratan

- a. SK CPNS;
- b. SK PNS;
- c. SK Terbaru;
- d. Ijazah & Transkrip Nilai S1;
- e. Surat izin/rekomendasi dari pimpinan (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) untuk melanjutkan pendidikan tingkat pascasarjana;
- f. Surat Pernyataan dari pimpinan (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II dan ditandatangani di atas materai 10.000) yang menyatakan bahwa calon penerima beasiswa akan ditempatkan pada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang studi yang telah dijalani sekembalinya ke satuan kerja asal apabila dinyatakan sebagai penerima beasiswa;
- g. Pemenuhan persyaratan relevansi tugas dan fungsi pekerjaan dengan program studi yang dipilih, bagi PNS dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan (SPMJ)/Surat Keputusan/Surat Tugas yang menyatakan yang bersangkutan tugas dan fungsinya terkait dengan pembuatan kebijakan, dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari unit yang menangani kepegawaian dari masing-masing satuan kerja kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas di bidang terkait di atas materai 10.000;

- h. Outline rencana tugas akhir maksimal 1 halaman (judul, latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir dengan topik yang sesuai dengan bidang hukum khususnya regulasi digital).

Seluruh kelengkapan dokumen dilakukan secara paralel dengan melengkapi berkas persyaratan yang dikirimkan kepada Tim Admin Beasiswa Sekretariat Badan Litbang SDM (beasiswadn@kominfo.go.id) dan pendaftaran secara daring di Universitas Padjadjaran melalui laman <https://smup.unpad.ac.id/magister/>.



DIAGRAM ALUR

PROGRAM BEASISWA S2 DALAM
NEGERI PROGRAM MAGISTER
ILMU HUKUM KEKHUSUSAN
REGULASI DIGITAL



**BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110

***TIMELINE* SELEKSI MASUK UNIVERSITAS PADJADJARAN (SMUP)
PROGRAM BEASISWA S2 DALAM NEGERI KEMENKOMINFO TAHUN 2022**

Batas Waktu Pendaftaran ke Admin Beasiswa Kominfo	11 Desember 2022
Batas Waktu Pendaftaran SMUP	12 Desember 2022
Verifikasi Dokumen	12 - 15 Desember 2022
Ujian/Wawancara	16 Desember 2022
Pengumuman Seleksi	19 Desember 2022

**Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, diharapkan agar dapat memantau website Universitas Padjadjaran.*

Daftar Lampiran

Kepada Yth.:

- 1. Kementerian Dalam Negeri Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM
- 2. Kementerian Luar Negeri Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- 3. Kementerian Pertahanan Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
- 4. Kementerian Hukum dan HAM Indonesia**
 - a. Sekretariat Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM
- 5. Kementerian Keuangan Indonesia**
 - a. Sekretariat Jenderal
 - b. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM dan ESDM
- 7. Kementerian Perindustrian Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM Industri
- 8. Kementerian Perdagangan Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan
- 9. Kementerian Sosial**
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
 - b. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial
- 10. Kementerian Pertanian Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- 11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
- 12. Kementerian Perhubungan Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan

- 13. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan
- 14. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
- 15. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Pengembangan SDM
- 16. Kementerian Kesehatan Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Indonesia
 - b. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 17. Kementerian Agama Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
- 18. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- 19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi
- 20. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
 - b. Staf Ahli Bidang SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 21. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
 - b. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 22. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**
 - a. Sekretaris Kementerian
- 23. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
 - b. Kepala Deputy Bidang Koordinasi SDM
- 24. Kementerian Sekretariat Negara Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian
 - b. Deputy Bidang Administrasi Aparatur
- 25. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementrian
 - b. Deputy Bidang Pengembangan SDM
- 26. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia**
 - a. Sekretaris Kementerian

- 27. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia**
a. Sekretaris Kementrian
b. Deputi Bidang SDM Aparatur
- 28. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (BAPPENAS)**
a. Sekretaris Utama
b. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
- 29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara**
a. Sekretaris Kementerian
b. Deputi Manajemen SDM Eksekutif
- 30. Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia**
a. Sekretaris Kementerian
- 31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia**
a. Sekretaris Kementerian Pariwisata Indonesia
b. Deputi Pengembangan SDM Aparatur
- 32. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia**
a. Sekretaris Jenderal
b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
- 33. Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia**
a. Sekretaris Jenderal
- 34. Arsip Nasional Republik Indonesia**
a. Sekretaris Utama
- 35. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia**
a. Sekretaris Umum
- 36. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional**
a. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
b. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan
- 37. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**
a. Sekretaris Jenderal
b. Direktur Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- 38. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan**
a. Sekretaris Utama
b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangagn Pengawasan
- 39. Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi**
a. Sekretaris Utama
b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organinisasi
- 40. Lembaga Administrasi Negara**
a. Sekretaris Utama
b. Deputi Diklat Aparatur

- 41. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI)**
 - a. Sekretaris Utama Mabes Polri
 - b. Deputi SDM
- 42. Markas Besar Tentara Negara Indonesia (MABES TNI)**
 - a. Sekretaris Komandan TNI
- 43. Badan Koordinasi Penanaman Modal**
 - a. Sekretaris Utama
- 44. Badan Informasi Geospasial**
 - a. Sekretaris Utama
- 45. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**
 - a. Sekretaris Utama
- 46. Badan Pembinaan Hukum Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 47. Badan Pengawasan Obat dan Makanan**
 - a. Sekretaris Utama
- 48. Badan Pengelola Industri Strategis**
 - a. Sekretaris Utama
- 49. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan**
 - a. Sekretaris Utama
- 50. Badan Pertahanan Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 51. Badan Pertimbangan Telekomunikasi**
 - a. Sekretaris Utama
- 52. Badan Standarisasi Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 53. Badan Urusan Logistik**
 - a. Sekretaris Utama
- 54. Badan Pusat Statistik**
 - a. Sekretaris Utama
- 55. Badan Narkotika Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 56. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**
 - a. Sekretaris Utama
- 57. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 58. Badan Intelijen Negara**
 - a. Sekretaris Utama
- 59. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)**
 - a. Sekretaris Utama
- 60. Badan Siber dan Sandi Negara**
 - a. Sekretaris Utama

- 61. Badan Riset dan Inovasi Nasional**
 - a. Sekretaris Utama
- 62. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan**
 - a. Sekretaris Utama
- 63. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 64. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 65. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Jenderal
- 66. Komisi Penyiaran Indonesia**
 - a. Sekretaris KPI Pusat
- 67. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**
 - a. Sekretaris Jenderal
- 68. Badan Nasional Penanggulangan Bencana**
 - a. Sekretaris Utama
- 69. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 70. Bank Indonesia**
 - a. Sekretaris Utama
- 71. Lembaga Sandi Negara**
 - a. Sekretaris Utama